

**PERUBAHAN WEWENANG PENGHULU PASCA KELUARNYA *STAATSBLAD*
1937 NO. 116 DI KASUNANAN SURAKARTA TAHUN 1937-1940 M**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
UIN Sunan Kalijaga untuk Memenuhi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)

Oleh:

AGUS TRIYANTA

NIM: 13120043

JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Triyanta

NIM : 13120043

Jenjang/Jurusan : S1/Sejarah dan Kebudayaan Islam (SKI)

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri bukan plagiat karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Nama : Agus Triyanta

NIM : 13120043

Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam (SKI)

Yogyakarta, 5 Oktober 2018



menyatakan,

Agus Triyanta

NIM.: 13120043

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
**Dekan Fakultas Adab dan
Ilmu Budaya**
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi berjudul:

**PERUBAHAN WEWENANG PENGHULU PASCA KELUARNYA *STAATBLAD*
1937 NO.116 DI KASUNANAN SURAKARTA TAHUN 1937-1940 M**

yang ditulis oleh:

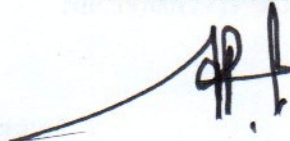
Nama : Agus Triyanta
NIM. : 13120043
Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam (SKI)

saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam sidang munaqasyah.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 5 Oktober 2018

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. H. Dudung Abdurrahman, M. Hum.
NIP.: 196303061989031010



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 513949 Fax. (0274) 552883 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DA /PP.00.9/3565/2018

Tugas Akhir dengan judul : PERUBAHAN WEWENANG PENGHULU PASCA KELUARNYA STAATSBLAD
1937 NO. 116 DI KASUNANAN SURAKARTA TAHUN 1937-1940 M


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AGUS TRIYANTA
Nomor Induk Mahasiswa : 13120043
Telah diujikan pada : Senin, 22 Oktober 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang


Prof. Dr. H Dudung Abdurrahman, M.Hum
NIP. 19630306 198903 1 010

Penguji I


Prof. Dr. H. Mundzhan Yusuf, M.Si.
NIP. 19500505 197701 1 001

Penguji II


Riswinarno, S.S., M.M.
NIP. 19700129 199903 1 002

Yogyakarta, 22 Oktober 2018
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
DEKAN


Dr. H. Akhmad Patah, M.Ag.
NIP. 19610727 198803 1 002

MOTTO

Firman Allah Al-Quran Surat Al Insyirat jus 30 ayat 6

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Inna ma'al' 'usri yusraa

“ Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan untuk :

Bapak, ibu dan adik-adik ku selalu menjadi motivasi ku untuk menyelesaikan tugas akhir

Alamatku Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam (SKI) Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga

ABSTRAK

PERUBAHAN WEWENANG PENGHULU PASCA KELUARNYA *STAATSBLAD* 1937 NO. 116 DI KASUNANAN SURAKARTA TAHUN 1937-1940 M

Penelitian ini mengulas tentang Perubahan Peran Penghulu pasca keluarnya *Staatsblad* 1937 Nomor 116 di Kasunanan Surakarta didasarkan pada beberapa alasan: (1) Penghulu merupakan ulama pemerintahan yang memiliki tugas sebagai *qadi* di pengadilan agama dan memiliki wewenang besar terhadap berlangsungnya syariat Islam di Kasunanan Surakarta (2) Seiring kuatnya pengaruh kolonial di Kasunanan Surakarta abad XIX membawa perubahan wewenang penghulu di Kasunanan Surakarta yang, salah satu kebijakan dengan adanya *Staatsblad* 1937 Nomor 116 berpengaruh terhadap keadaan penghulu yang semakin terbatas kewenangannya di bidang hukum keluarga (3) Kebijakan pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan peraturannya *Staatsblad* 1937 Nomor 116 menimbulkan reaksi protes di kalangan penghulu, puncaknya seluruh penghulu se-Jawa Madura berkumpul di Surakarta menentang kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Oleh karena itu penelitian merumuskan beberapa pertanyaan yaitu: 1. Bagaimana peran penghulu pra *Staatsblad* 1937? 2. Bagaimana latar belakang dan isi *Staatsblad* 1937 ? 3. Apa dampak *Staatsblad* 1937 Nomor 116 terhadap peran penghulu di Surakarta.

Penelitian ini adalah penelitian sejarah sosial, yaitu penulisan sejarah yang menempatkan masyarakat sebagai bahan kajian. Pendekatan yang digunakan sosiologi dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga yaitu konsep penghulu, perubahan dan wewenang. Penelitian menggunakan metode sejarah yang terdiri *heuristik*, *verifikasi*, *interpretasi* dan *historiografi*. Pengumpulan data melalui penelitian literatur untuk sifat penelitian adalah deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini pertama penghulu merupakan bagian birokrasi keagamaan di Kasunanan Surakarta memiliki wewenang besar terhadap berlangsung syariat Islam di keraton Surakarta penghulu memiliki tanggungjawab untuk mendidik anggota keluarga kerajaan. Kedua kuat pengaruh kolonial Belanda di Kasunanan Surakarta di dalam aspek hukum Islam pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan peraturan *Staatsblad* 1937 Nomor 116 berisi peraturan mengatur tugas penghulu di Kasunanan Surakarta di pengadilan agama terbatas pada hukum keluarga Islam. Ketiga Hal ini menyebabkan reaksi protes di kalangan penghulu menuntut pemerintah kolonial Belanda untuk mencabut peraturan *Staatsblad* 1937 Nomor 116 Karena merugikan kalangan penghulu Kasunanan Surakarta. Namun usaha penghulu sia-sia pemerintah kolonial Belanda enggan menyabut peraturan telah di keluarkan.

Kata Kunci : Perubahan, Wewenang, Penghulu Kasunanan, *Staatsblad*, 1937

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. رَبِّ اشْرَحْ لِي
صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

Puji syukur ke hadirat Allah swt yang senantiasa memberikan *rahman* dan *rahim-Nya*. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada *nabiyullah wa habibullah*, Muhammad saw. Sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi yang berjudul “Perubahan Wewenang Penghulu Pasca Keluarnya *Staatblad* 1937 No. 116 di Kasunanan Surakarta 1937-1940 ” hal ini merupakan usaha penulis untuk memahami peristiwa sejarah berkaitan dengan adanya surat keputusan Raja Belanda dalam *Staatblad* 1937 nomor 116 merubah wewenang penghulu di Kasunanan Surakarta. Pada kenyataan proses penulisan skripsi ini tidaklah semudah yang dibayangkan. Banyak kendala yang penulis hadapi, baik selama penelitian maupun selama penyusunan. Terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari doa, bantuan, serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr.H.Dudung Abdurahman, M.Hum., selaku pembimbing skripsi. Berkat nasehat, saran dan ilmu yang telah diberikan serta meluangkan waktunya, Penulis pada waktu awal penyusunan skripsi mengalami kesulitan mampu

menyelesaikan penelitian dengan segala kekurangan dan keterbatasan.

2. Drs. Badrun Alana, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik. Orang pertama yang memberikan dukungan menyetujui dan mendorong penulisan untuk mengambil judul penelitian ini. Nasehat dan saran telah banyak membantu penulis dalam menempuh studi di UIN Sunan Kalijaga.
3. Para dekanat yang pernah menjabat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Adab dan Ilmu Budaya.
4. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, khususnya jurusan SKI yang memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Kedua orang tua Sarjono dan ibu Sumarni tidak pernah henti memberi semangat dan doanya
6. Teman-teman SKI 2013 khususnya SKI B 2013 dan teman-teman yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Kalian selalu memberi semangat untuk belajar giat selama di bangku perkuliahan.
7. Sahabat-sahabat keluarga mahasiswa UIN SUKA Klaten (KAMUSUKA) yang telah memberikan momen-momen bersama yang tak terlupakan.
8. Para Jamaah ngopi dan ngaji Rifai, Tamam, Isak, Ifan, Ardian, Okta, Nasrur, Rahmat, Kasir dan fais yang selalu memberikan saran-saran dalam penulisan skripsi.
9. Terimakasih banyak ke pada perpustakaan Rekso Pustaka Mangkunegaran dan staf atas diperkannya untuk mencari informasi yang diperlukan penelitian penulis.
10. Terimakasih kepada Museum Radya Pustaka Surakarta yang telah berkenan

menyediakan data penelitian bagi penulis.

11. Terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini, yang tidak dapat disebut satu persatu oleh penulis dan terimakasih atas doa yang telah dipanjatkan.

Ucapan terimakasih ini tidak cukup untuk melukiskan rasa terimakasih penulis kepada satu persatu pihak yang membantu dan mendukung. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi menjadi tanggung jawab penulis. Atas segala keterbatasan penulis skripsi ini. Kritik dan saran membangun sangat diharapkan penulis. Dengan kehadiran skripsi ini diharapkan memberi manfaat dan membawa wawasan pengetahuan khususnya sejarah penghulu di Surakarta.

Yogyakarta, 21 Safar 1440 H

5 Oktober 2018 M

Penulis,

Agus Triyanta

13120043

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Bendel Perkumpulan Penghulu dan Pegawai
- Lampiran 2 Foto Penghulu
- Lampiran 3 *Staatsblad* 1937 Nomor 116
- Lampiran 4 Surat Perintah Pakubuwowono tentang pengangkatan Penghulu
- Lampiran 5 Surat Perintah Pakubuwowno tentang tugas Penghulu
- Lampiran 6 Surat Peraturan bagi orang tinggal di Pakauman
- Lampiran 7 Surat Izin Penelitian dari Gubenur Provisi Yogyakarta
- Lampiran 8 Surat Izin Penenlitian dari Fakultas Adab dan Ilmu Budaya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Landasan Teori.....	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II: KEADAAN PENGHULU DI KASUNANAN SURAKARTA SEBELUMKELUARNYA SAATSBALAD 1937	
A. Gambaran Umum Kasunanan Surakarta	15
a. Pembagaan Wilayah	15
b. Struktur Sosial Masyarakat.....	16
c. Admintrasi Pemerintahan.....	17
B. Birokrasi Penghulu di Kasuanan Surakarta	19
a. Struktur Penghulu.	21
b. Syarat Pengangkatan Penghulu.....	24
C. Tugas Penghulu Kasuanan Surakarta	25

a. Penghulu dalam Kasunanan Surakarta	25
b. Penghulu luar Kasunanan Surakarta.....	31
BAB III: STAATSBLAD 1937 NO. 116	34
A. Latar Belakang Lahirnya <i>Staatsblad</i> No. 116.....	34
B. Isi <i>Staatsblad</i> 1937 No. 116.....	40
C. Sasaran <i>Staatsblad</i> 1937 No. 116	42
BAB IV: DAMPAK STAATSBLAD1937.....	45
A. Pembaruan Tugas Penghulu di Kasunanan Surakarta.....	45
B. Pembentukan Perhimpunan Penghulu dan Pegawai.....	48
C. Reaksi Umat Islam terhadap Penerapan <i>Staatsblad</i> 1937.....	55
BAB V: PENUTUP.....	62
a. Kesimpulan.....	62
b. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata penghulu diartikan sebagai petugas keagamaan yang melaksanakan upacara pernikahan secara Islam. Istilah kata penghulu dari segi bahasa memiliki berbagai istilah, dalam bahasa Sunda disebut *pangulu*, dalam bahasa Jawa disebut *pengulu* dan bahasa Madura : *pangoloh* dan dalam bahasa Melayu adalah penghulu, sedangkan penghulu berasal dari kata hulu, berarti kepala mula-mula yang diartikan sebagai orang yang mengepalai, orang yang terpenting. Namun, pada perkembangannya istilah penghulu berarti seorang ahli soal agama Islam yang diangkat oleh pemerintah.¹

Pemerintah kolonial Belanda pada masa awal kekuasaannya tidak mau ikut campur urusan hukum Islam, hal ini dilatarbelakangi ketidaktahuan pemerintah kolonial Belanda mengenai hukum Islam. Baru pada tahun 1820 M.², pemerintah kolonial Belanda ingin menerapkan hukum Belanda, di aspek hukum pidana dan perdata. Bahwa pemerintah kolonial Belanda tidak mampu menghapus hukum Islam yang sudah lama dijalankan rakyat Indonesia, maka para penghulu dibiarkan untuk tetap menyelenggarakan Peradilan Agama. Demikian pula hukum Islam tetap dapat dilaksanakan oleh orang Islam.³ Untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda dalam melaksanakan politik dan hukum hendak menata dan mengubah

¹ G. F. Pijper, *Beberapa Studi Tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950*, terj. Tudijmah dan Yessy dan Agusdin (Jakarta : UI Press, 1987), hlm. 67.

² Ibnu Qayim, *Kiai Penghulu Jawa Peranannya di Masa Kolonial* (Jakarta : Gema Insan Perss, 1997), hlm. 45.

³ Ahmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 63.

peraturan hukum di Indonesia dengan hukum Belanda. Politik ini dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah Belanda yang telah melakukan kodifikasi hukum pada tahun 1838 M. Berdasarkan anggapan bahwa hukum Eropa dipandang lebih baik daripada hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk melaksanakan politik hukum sadar, pemerintah kolonial Belanda mengangkat satu komisi yang diketuai oleh Sholten van Oud Hearlem. Komisi ini bertugas melakukan penyesuaian undang-undang Belanda dengan keadaan hukum di Indonesia.⁴

Hukum itu diwujudkan dalam bentuk satu kitab hukum (undang-undang). Setelah komisi tim penyusunan kitab hukum menyelesaikan tugasnya, Shoiten van Oud Healem menulis nota dinas berisi rancangan pembaruan peradilan agama di Jawa dan Madura yang ditunjukkan pada pemerintah kolonial Belanda. Hasil pemikiran Shoiten van Oud Hearlem dijalankan pemerintah kolonial Belanda dalam bentuk peraturan.⁵ *Regeering Reglement* (peraturan yang menjadi dasar pemerintah kolonial menjalankan kekuasaannya di Indonesia tahun 1855). Peraturan itu, mengintruksikan kepada pengadilan negeri untuk menggunakan undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan di kalangan bumi putra jika terjadi persengketaan.⁶

Pada tahun 1882 pengadilan agama didirikan berlandaskan pasal 78 ayat 2 75-R.R. *Regeering Reglement* yang mengatur hukum perdata golongan bumi putra. Selain itu, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan keputusan Nomor 24 tanggal 19 Januari 1882 dimuat dalam *Staatsblad* Nomor 152 dan diberlakukan pada tanggal 1 Agustus

⁴ Taufik Abdullah, *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara* (Jakarta : LP3ES, 1988), hlm, 64.

⁵ Qayim, *Kiai Penghulu Jawa*, hlm. 46.

⁶ *Ibid.*, hlm, 47-48.

dalam *Staatsblad* 1882 Nomor 152.⁷ Peraturan ini mengatur peran penghulu untuk mengurus perkara tentang pernikahan, perceraian, mahar, nafkah, sah tidaknya anak, perkawinan, hukum waris, hibah, sedekah, baitul mal dan wakaf. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kewenangan dan peranan penghulu hanya pada hukum perkawinan dan hukum waris.⁸

Pembaruan-pembaruan hukum yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1922 akhirnya mencapai puncaknya yang ditandai dengan lahirnya *Staatsblad* 1937 Nomor 116 hukum kewarisan dicabut dan dialihkan ke pengadilan negeri. Dengan berlakunya *Staatsblad* 1937 Nomor 116, maka penghulu memasuki fase baru, dahulu penghulu mengurus masalah hukum keluarga, hukum perceraian dan masalah hukum waris, kini peran penghulu semakin dipersempit. Hal ini bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk pengebiran hukum Islam.

Pembahasan mengenai perubahan peran penghulu di Kasunanan Surakarta menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut karena dengan diterbitkannya *Staatsblad* 1937 Nomor 116, peranan penghulu di pengadilan agama semakin terbatas pada bidang hukum keluarga dan hukum perceraian. Selain itu, berlakunya *Staatsblad* 1937 Nomor 116 merupakan bentuk pengebiran hukum Islam sebelum kedatangan kolonial Belanda, hukum Islam merupakan hukum asli di Indonesia jauh sebelum kolonial Belanda berkuasa. Hal ini menimbulkan reaksi keras dari kalangan umat Islam, selain itu kalangan penghulu sebagai pegawai pemerintah kolonial Belanda menentang

⁷*Staatsblad* merupakan lembaran negara pada masa pemerintahan Kolonial Belanda di Nusantara berisi tentang publikasi dari segala bentuk pengumuman, kebijakan, peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kolonial Belanda. Lihat. S. Wajohwasito, *Kamus umum Belanda-Indonesia* (Jakarta : Lestarai Perkasa, 2006). hlm. 662.

⁸ Abdullah, *Tradisi dan Kebangkitan Islam*, hlm, 216.

berlakunya *Staatsblad* 1937 Nomor 116 di Kasunanan Surakarta. Berdasarkan uraian-uraian di atas penulis tertarik untuk mengungkapkan sejarah perubahan peran penghulu pasca keluarnya *Staatsblad* 1937 Nomor 116 bertujuan memberikan informasi yang berkaitan dengan perubahan peran penghulu pasca keluarnya *Staatsblad* 1937 Nomor 116 di Kasunanan Surakarta.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini berjudul “Perubahan Wewenang Penghulu Pasca Keluarnya *Staatsblad* 1937 nomor 116 di Kasunanan Surakarta 1937-1940 M. Fokus kajian ini adalah perubahan wewenang penghulu pasca keluarnya *Staatsblad* 1937. Penelitian ini dibatasi tahun 1937-1940 M. Tahun 1937 merupakan awal tahun berlakunya *Staatsblad* 1937 Nomor 116. Pada tahun ini, sebagai awal tahun perubahan peran penghulu terbatas pada masalah hukum keluarga. Adapun untuk batasan akhir adalah tahun 1940 karena pada tahun tersebut penghulu tidak berhasil mengembalikan kewenangan hukum waris ke pengadilan agama dan akhirnya dibubarkan Perhimpunan Penghulu dan Pegawai (PPDP). Berdasarkan batasan dan penjabaran masalah di atas, peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Apa peran penghulu pra *Staatsblad* 1937?
2. Bagaimana latar belakang dan isi *Staatsblad* 1937 Nomor 116?
3. Apa dampak *Staatsblad* 1937 Nomor 116 terhadap peran penghulu di Surakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perubahan wewenang penghulu sebelum dan sesudah berlakunya *Staatsblad* 1937.
2. Untuk mengetahui alasan kolonial Belanda mengeluarkan *Staatsblad* 1937.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Staatsblad* 1937 terhadap penghulu di Kasunanan Surakarta

Adapun kegunaan penulisan ini sebagai berikut :

1. Sebagai pelengkap dari penulisan terdahulu mengenai masalah peran penghulu.
2. Mengembangkan khasanah keilmuan khususnya masalah sejarah pada masa kolonial.
3. Memberikan gambaran keadaan penghulu di Surakarta sebelum dan sesudah berlakunya *Staatsblad* 1937.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk mengkaji permasalahan perubahan peranan penghulu pasca keluarnya *Staatsblad* 1937 Nomor 116 ini penulis menemukan beberapa buku dan skripsi berkaitan dengan penelitian ini. Pertama adalah buku *Kyai Penghulu Jawa; Peranan di Masa Kolonial* karya Ibnu Qayim yang diterbitkan oleh Gema Insani Pers pada tahun 1997. Buku ini menjelaskan berbagai dimensi ulama penghulu dan lembaganya: permasalahan akibat hubungan sosial keagamaan yang dialami umat Islam dan khususnya bagi para penghulu pada masa penjajahan Belanda (1882-1942). Penulisan yang dilakukan oleh Ibnu Qoyim ini memberi gambaran umum keadaan penghulu pada

masa Kolonial Belanda khususnya di Jawa. Adapun penelitian ini membahas perubahan peran penghulu pasca keluarnya *Staatsblad* Nomor 1937 di Surakarta. Perbedaannya karya lainya yang ditulis Ibnu Qayim dimulai sejak 1882 M. Tahun awal peranan penghulu ditarik sebagai bagian birokrasi Kolonial Belanda diperkuat dengan lahirnya *Staatsblad* 1882 Nomor 152. Adapun penulisan ini memfokuskan pada perubahan wewenang penghulu pasca keluarnya *Staatsblad* 1937 Nomor 116 di Surakarta yang memberi dampak perubahan wewenang penghulu sebatas hukum keluarga.

Kedua, “*Tugas dan Wewenang Penghulu Kasultana Yogyakarta berdasarkan Staatsblad tahun 1882,*” sebuah skripsi disusun oleh Siti Lailatul Munawaroh, mahasiwa jurusan Sejarah kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Ilmu budaya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013. Skripsi ini berisi penelitian mengenai tugas dan wewenang penghulu kasultanan Yogyakarta berdasakan *Staatsblad* tahun 1882. Karya tersebut memberikan informasi ke penelitian berkaitan dengan tugas dan wewenang Penghulu kasultanan Yogyakarta berdasarkan *Staatsblad* 1882 Nomor 152. Tersebut penelitian ini membahas tentang peran dan wewengan penghulu Yogyakarta berdasakan *Staatsblad* 1882 Nomor 152. Sedangkan penelitian dibahas mengenai perubahan peran penghulu di Kasunanan Surakarta pasca keluarnya *Staatsblad* 1937 Nomor 116 yang membawa perubahan wewenang penghulu semakin terbatas pada hukum keluarga.

Ketiga, “*Abdi Dalem Penghulu Pada Masa Pemerintahan Paku Buwowno X Kraton Kasunanan Surakarata 1893-1939*” disusun oleh Yeni Dwi Ayu Pramita mahasiswa jurusan Sejarah, Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret

Surakarta 2013. Skripsi ini berisi mengenai peranan penghulu Kasunanan Surakarta pada masa pemerintahan Pakubuwana X. Karya ini memberikan informasi pada penelitian mengenai kehidupan penghulu dan peranannya di masa pemerintahan Paku Buwono X adapun perbedaan karya tersebut dengan penelitian ini adalah menggambarkan yang berkaitan dengan perubahan wewenang penghulu Kasunanan Surakarta setelah dikeluarkan *Staatsblad* 1937 Nomor 116 yang memberi dampak langsung kepada penghulu dilihat dari batasan waktu penelitian ini dimuat 1937 hingga 1940. Disebabkan pada tahun 1937 merupakan awal tahun berlakunya *Staatsblad* 1937 Nomor 116. Pada tahun ini, sebagai awal tahun perubahan wewenang penghulu terbatas pada masalah hukum keluarga. Adapun untuk batasan akhir Penulisan tahun 1940 karena pada tahun tersebut penghulu tidak berhasil mengembalikan kewenangan hukum waris ke pengadilan agama dan akhirnya dibubarkan Perhimpunan Penghulu dan Pegawai (PPDP) sebagai akhir perjuangan penghulu.

Keempat, “*Peranan Penghulu Mangkunegara pada Masa Pemerintahan Mangkunegara VII tahun 1916-1944*” disusun oleh Nur Lutfika Muhiba Fatatik mahasiswa. Jurusan Sejarah Fakultas Sastra dan Seni Rupa, Universitas Sebelas Maret Surakarta 2008. Skripsi ini mengulas peranan penghulu pada masa pemerintahan Mangkunegaran VII di Surakarta. Karya ini memberikan informasi mengenai peranan penghulu Mangkunegara dalam pemerintahan raja Mangkunegaran VII. Selain itu memberi gambaran umum kehidupan keagamaan menjelang bangkitnya organisasi-organisasi Islam di Surakarta pada masa pemerintahan Mangkunegaran VII. Perbedaan karya tersebut dengan penelitian ini adalah pada fokus pembahasan. Karya ini difokuskan pada peranan penghulu Mangkunegaran, sementara fokus penelitian pada

perubahan wewenang penghulu Kasunanan Surakarta setelah terbitnya *Staatsblad* 1937 Nomor 116.

Sri Susuhunan Paku Buwono X Perjuangan, Jasa dan Pengabdiannya untuk Bangsa buku ini karya Purwadi dkk di terbitkan oleh Bangun Bangsa pada tahun 2009. Buku ini menguraikan tentang Biografi politik Paku Buwono X. Perjuangan untuk bangsa dan jasa Paku Buwono dalam memajukan Kasunanan Surakarta. Penelitian yang di lakukan Purwadi dkk cukup detil menggambarkan jasa dan perjuangan Paku Buwono X untuk bangsa. Meskipun demikian buku ini berbeda dengan penlitian yang dilakukan penulis lebih menekankan perubahan wewenang penghulu Kasuanan Surakarta pasca keluarnya *Staatsblad* 1937 Nomor 116 sebagai bagian birokrasi keagamaan di Kasuanan Surakarta.

Berkaitan dengan karya sejarah di atas, baik berupa buku maupun skripsi, peneliti menyimpulkan terdapat kaitan serta perbedaan dalam objek permasalahan yang dikaji penelitian dengan karya-karya tersebut. Beberapa judul di atas memuat pembahasan yang lebih umum sedangkan skripsi lain lebih khusus membahas tentang perubahan peran penghulu. Dalam penelitian yang dilakukan, posisi penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah melanjutkan penelitian yang telah ada, namun lebih spesifik terkait perubahan wewenang penghulu pasca keluarnya *Staatsblad* 1937 Nomor 116.

E. Landasan Teori

Penulisan sejarah merupakan penggambaran suatu peristiwa masa lampau yang sangat tergantung pada pendekatan dari segi mana penulis memandangnya, dimensi mana yang diperlihatkan dan unsur-unsur mana yang diungkapkan. Sebagai hasil

penulisannya sangat ditentukan oleh jenis pendekatan yang digunakan.⁹ Berdasarkan penulisan ini, maka pendekatan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan sosiologi. Digunakan adalah konsep “perubahan sosial” yaitu proses perubahan bentuk yang mencakup keseluruhan aspek kehidupan masyarakat terjadi baik secara alami maupun karena rekayasa sosial.¹⁰ Konsep perubahan sosial digunakan sebagai landasan dalam menganalisis perubahan sosial tahun 1937-1940 M. Perubahan peran penghulu pasca keluarnya *Staatsblad* 1937 di Surakarta.

Pendekatan sosiologi ini dipergunakan untuk mengungkap masa lalu tentang segi-segi sosial dari peristiwa yang dikaji. Kontruksi sejarah dengan pendekatan sosiologi dapat dikatakan pula sebagai sejarah sosial, karena pembahasannya mencakup golongan sosial yang berperan, jenis hubungan sosial, konflik berdasarkan kepentingan dan pelapisan sosial. Secara metodologis, penggunaan sosiologi dalam kajian sejarah sebagaimana diungkapkan Weber bertujuan untuk memahami arti subjektif dari kelakuan sosial, bukan semata-mata hanya menyelidiki objeknya.¹¹ Pendekatan sosiologi digunakan untuk melihat perubahan peranan penghulu. Untuk memudahkan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa konsep di antaranya konsep penghulu, perubahan dan wewenang.

Pertama konsep, penghulu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata penghulu memiliki arti kepala urusan agama Islam di kabupaten atau penasehat urusan

⁹Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta : Grafindo Pustaka, 1993), hlm, 4.

¹⁰ Agus Salim, *Perubahan Sosial : Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia* (Yogyakarta Tiara Wacana, 2002), hlm, vii.

¹¹Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta : Ombak, 2011), hlm. 12.

agama Islam di peradilan negeri.¹² Penghulu yang diartikan sebagai petugas keagamaan yang melaksanakan upacara pernikahan secara Islam.¹³ Selain itu, penghulu memiliki makna orang yang ahli di bidang agama Islam yang diakui dan diangkat oleh pemerintah.¹⁴ Penghulu adalah kelompok ulama pejabat yang kedudukan peran sosial keagamaannya berada di jalur aktivitas sosial keagamaan yang condong sebagai pelaksana bidang kehakiman yang berkaitan hukum syariat Islam.¹⁵

Kedua, konsep perubahan adalah. Menurut Strasser dan Randall perubahan adalah membayangkan sesuatu yang terjadi dalam waktu tertentu berurusan dengan perbedaan dengan keadaan yang diamati antara sebelum dan sesudah jangka waktu tertentu. Untuk dapat menyatakan perbedaannya ciri-ciri unit analitis harus diketahui dengan cermat meski terus berubah. Perubahan sosial menurut Farly adalah perubahan pola perilaku, hubungan sosial lembaga dan struktur sosial pada waktu tertentu.¹⁶ Adapun menurut Selo Soemartjan perubahan adalah segala perubahan yang terjadi didalam lembaga-lembaga masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial termasuk nilai-nilai sikap dan pola tingkah laku antar kelompok di dalam masyarakat.¹⁷

Ketiga konsep wewenang adalah suatu kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang baru dapat diterima oleh masyarakat saat memiliki wewenang yang sah baik secara hukum formal maupun norma-norma sosial dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat.

Sedangkan wewenang menurut. Menurut Mac Iver R.M wewenang adalah merupakan

¹²Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), hlm.664.

¹³Harun Nasution *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta : Djambatan 1992), hlm. 761.

¹⁴Kafrawi Ridwan, dkk , *Ensiklopedi Islam*, jilid 4 (Jakarta : Iktisar Baru Van Hoven, 1993), hlm 92.

¹⁵ Ibnu Qayim, *Kiai Penghulu Jawa*, hlm. 65 .

¹⁶Piotr Szompka, *Sosiologi Perubahan Sosial terj Prenda* (Jakarta : Fajar Interperatama 2007), hlm 3.

¹⁷Selo Sumarjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta* (Yogayakrta : Komintas Bambu 2009), hlm. xxiv

suatu hak yang berdasarkan pada suatu pengaturan sosial, yang berfungsi menetapkan kebijaksanaan, keputusan dan menyelesaikan pertentangan. Sedangkan wewenang menurut Max Weber adalah sebagai kekuasaan yang sah.¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara, jalan atau petunjuk teknis yang dilakukan dalam proses penulisan.¹⁹ Metode penulisan merupakan cara yang digunakan penulis untuk menyelesaikan suatu masalah penulisan. Adapun penulisan sejarah adalah suatu usaha untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu terkait dengan prosedur ilmiah.²⁰ Metode sejarah bertumpu pada empat langkah, heuristik atau pengumpulan sumber, verifikasi atau kritik sumber, interpretasi atau analisis sumber dan historiografi atau penulisan sejarah.²¹

Prosedur Penulisan ini ditempuh sebagaimana penjelasannya di bawah ini:

1. Heuristik

Heuristik adalah suatu teknik, atau seni untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah.²² Adapun sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan ini adalah: sumber tertulis berupa buku-buku, majalah dan arsip yang sesuai dengan tema penulisan yang diangkat. Pada tahapan ini penulis melakukan pencarian ke sejumlah perpustakaan, yaitu: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan Grahata Pustaka, Perpustakaan Universitas Gajah Mada, Perpustakaan Universitas Sebelah Maret, Perpustakaan Monumen Pers. Secara umum sumber yang didapatkan adalah sumber sekunder untuk

¹⁸Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan* (Jakarta : BumiAksara,1994), hlm. 144.

¹⁹Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, hlm. 103.

²⁰Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta : Bentang Budaya, 2013), hlm.13.

²¹A. Daliman, *Metodelogi Penelitian Sejarah* (Yogyakarta : Ombak, 2012), hlm.28-29.

²²*Ibid*, hlm, 104.

melengkapi sumber primer, penulis mengumpulkan sumber tersebut di Perpustakaan Mangkunegaran dan Radiya Pustaka. Menemukan sumber primer berupa arsip.

2. Verifikasi

Verifikasi adalah kritik sumber untuk memperoleh keabsahan sumber yang didapatkan. Dalam hal ini diuji keabsahan keaslian sumber yang digunakan, tahap ini dilakukan dengan cara kritik eksternal dan kritik internal.²³ Kritik eksternal adalah cara melakukan pengujian terhadap aspek luar dari sumber sejarah. Kritik eksternal bertujuan untuk menguji keotentikan melalui bahan-bahan yang digunakan seperti kertas, tanda tangan dan bahan tulisan.²⁴ Adapun kritik internal dilakukan dengan cara membandingkan tulisan satu dengan tulisan lainnya. Berkaitan dengan kritik eksternal, Penulis melakukan kritik terhadap bahasa yang digunakan dalam sumber, bahasa yang digunakan masih menggunakan ejaan lama dan bahasa Jawa. Berkaitan dengan kritik internal, penulis melakukan kritik dengan cara membandingkan karya satu dengan karya lain.

3. Interpretasi

Tahapan ini merupakan tahapan penafsiran data yang telah menjadi fakta dengan cara analisis (menguraikan) dan sintesis (mengumpulkan) data yang relevan.²⁵ Dalam menganalisis permasalahan ini penulis menggunakan pendekatan sosiologi, konsep penghulu, perubahan dan wewenang.

4. Historiografi

²³*Ibid*, 108.

²⁴ M. Dien Majid dan Johan Wahyudi, *Ilmu Sejarah Sebuah Penganatar*. (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 36.

²⁵Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, hlm.102.

Historiografi merupakan tahapan akhir dari penulisan sejarah. Historiografi merupakan cara penulisan atau bisa diartikan sebagai pelaporan hasil penulisan sejarah yang dilakukan oleh sejarawan.²⁶ Pada tahapan ini hasil dari pencarian sumber dituangkan dalam bentuk tulisan dalam sistematika baku secara diskriptif analitis yang terbagi di setiap sub bab pembahasan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah suatu rangkaian pembahasan yang di dalamnya terdiri dari beberapa bab yang saling terkait satu sama lainnya. Untuk memudahkan, penulis menjabarkan ke dalam beberapa bab dan sub bab, sehingga dapat dipahami secara sistematis. Penulisan ini terdiri atas lima bab, yaitu:

Bab pertama membahas pendahuluan, latar belakang masalah, batasan masalah dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan pada pendahuluan ini bertujuan untuk memberi penjelasan secara umum mengenai keseluruhan rangkaian isi penulisan. Hasil penulisan ini diharapkan akan memperjelas masalah yang dibahas pada bab selanjutnya :

Bab kedua membahas keadaan Penghulu Kasunanan Surakarta sebelum keluarnya *Staatsblad* 1937 yang meliputi: kondisi Kasunanan Surakarta, wewenang penghulu Kasunanan Surakarta sebelum keluarnya *Staatsblad* 1937. Bab ini menjadi awal pembahasan mengenai gambaran umum Kasunanan Surakarta, struktur birokrasi pemerintah keraton dan struktur penghulu, wewenang penghulu dan. Bab ini bertujuan

²⁶M. Dien Majid dan Johan Wahyudi, *Ilmu Sejarah*, hlm. 231.

untuk mengetahui gambaran umum keadaan Kasunanan Surakarta penghulu sebelum keluarnya *Staatsblad* 1937 di Surakarta.

Bab ketiga membahas mengenai *Staatsblad* 1937 yang meliputi latar belakang keluarnya *Staatsblad* 1937, dan isi *Staatsblad* 1937, sasaran *Staatsblad* 1937. Bab ini memaparkan proses lahirnya *Staatsblad* 1937, serta tujuan dari berlakunya *Staatsblad* 1937 di Surakarta.

Bab keempat membahas mengenai dampak *Staatsblad* 1937 terhadap penghulu. Pada bab ini menjelaskan perubahan tugas baru penghulu di Kasunanan Surakarta pasca keluarnya *Staatsblad* 1937, di Surakarta, pembentukan perhimpunan penghulu dan pegawai, reaksi penghulu dengan berlakunya *Staatsblad* 1937.

Bab kelima adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini memaparkan jawaban dari berbagai permasalahan yang ditinjau

dalam penelitian, sementara saran berisi saran-saran dari penelitian soal penelitian sejenis yang berkaitan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penghulu merupakan ulama penjabat yang kedudukan peran sosial keagamaannya di jalur *at-tasyri wal-qadla* yakni sebagai pelaksana bidang kehakiman yang menyangkut hukum syariat Islam. Penghulu menjadi bagian dari ulama terikat yaitu ulama yang berada di dalam birokrasi Pemerintahan Kasunanan Surakarta, ulama ini menjadi seorang abdi dalem kraton atau ulama terikat. Di dalam bidang politik ulama terikat tidak seeluasa ulama bebas, ulama terikat diangkat menjadi pegawai keraton berdasarkan pilihan raja. Ulama terikat mengabdikan ilmu agama untuk kepentingan pemerintahan kerajaan. Penghulu di Kasunanan Surakarta memiliki tugas sentral di bidang keagamaan, penghulu bertugas menjalankan syariat Islam menjadi tanggu jawabnya, menjadi imam shalat jumat dan shalat fardu, menjalankan pengadilan Islam perkara perkawinan, waris wasiat, hukum pancung kepala memimpin shalat hajat untuk memohon keselamatan Kerajaan Surakarta kepada Allah, dan bertugas memohon keselamatan anggota keluarga kerajaan

Namun, pemerintah kolonial ingin melakukan kodifikasi hukum Islam. Pemerintah Belanda menunjuk ahli hukum Belanda, Scholten van Oud Hearlem untuk menyesuaikan undang-undang di Hindia Belanda, agar sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Belanda. Ambisi itu akhirnya diimplementasikan di dalam *Staatsblad* 1937 Nomor 116. Peraturan baru itu, menyebabkan kewenangan penghulu di dalam pengadilan agama semakin terbatas pada hukum

keluarga. Hal ini terpengaruh oleh *teori resepsi* diciptakan oleh Snouck dan Vollenhoven dan Ter Haar hukum yang berlaku di Indonesia bukan hukum Islam melainkan hukum adat. Teori ini sengaja dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mengkacaukan hukum Islam yang telah lama berlaku di Indonesia. Hal ini bertujuan menguasai hukum di Indonesia.

Intervensi kolonial Belanda di pengadilan agama menyebabkan kewenangan penghulu mengalami perubahan. Penghulu di Kasunanan Surakarta hanya berwenang memeriksa dan memutuskan perkara hukum seperti nikah, talak, rujuk diputuskan oleh penghulu. Selain itu penghulu bertugas di Mahkamah Tinggi Islam sebagai penghulu memutuskan perkara banding di pengadilan agama yang tempuh orang berperkara dan Penghulu sebagai penasehat pengadilan *Landraad* dalam hukum waris.

Kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda untuk mengurangi kewenangan penghulu di Pengadilan Agama dalam hal perkara hukum waris menimbulkan reaksi penolakan dari penghulu dan organisasi Islam. Puncaknya penghulu berkumpul di Surakarta untuk membentuk organisasi Perhimpunan Penghulu dan Pegawai (PPDP) yang bertujuan untuk memprotes penerapan Staatsblad No. 116 Tahun 1937, karena bertentangan dengan hukum Islam dan memaksa umat Islam murtad dari agamanya.

B. SARAN

Penelitian ini penulis sadar jauh dari kata sempurna. Akan tetapi penulis berharap dengan karya ini dapat mendorong penelitian lain untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penghulu. Maka perlu disampaikan saran sebagai berikut.

1. Setelah mengkaji perubahan peran penghulu pasca keluar *Staatsblad* di Kasunanan Surakarta, perlu di kaji lebih lanjut mengenai penghulu keraton Surakarta dari beberapa aspek yang belum tergali lebih dalam, seperti mengenai kontribusi penghulu dalam pengembangan Islam dan biografi penghulu.
2. Bagi Keraton Surakarta khususnya perpustakaan Sana Pustaka, sebaiknya arsip-arsip yang tersimpan dapat diakses oleh publik, sehingga dapat mempermudah penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Abdurrahman, Dudung. *Metode Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak, 2011.
- Abdurrahman, Wahid. *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*. Bandung: Rokasa daya, 1994.
- Abdullah, Taufik. *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES 1988.
- Abdullah, Amin. *Rekontruksi Metodologi Ilmu-Ilmu KeIslaman*. Yogyakarta: Suka Pres, 2003.
- Abdulsyani. *Sosiologi : Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta :Bumi Aksara. 1994
- Akmad, Arif. *Penafsiran al-Quran Penghulu Kraton Surakarta*. Semarang: Pasca Sarjana IAIN Wali Sanga, 2012.
- Burhanudin, jajat. *Ulama dan Kekuasaan Pergumulan Elit Muslim Dalam Sejarah Indonesia*. Jakarta: Mizan, 2012.
- Daliman, A. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2012.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Gunaryo, Ahmad. *Pergumulan Politik dan Hukum Islam Resposisi Peradilan Agama dari Peradilan Pupuk Bawang Menuju Peradilan Sesungguhnya* Yogyakarta: Pustaka, Pelajar, 2006.
- Hisyam, Muhamad. *Caught between Three Fires: The Javanese Penghulu Under The Dutch Colonial Administration 1882-1942*. Jakarta: INSI, 2001.
- Jalil, Basiq. *Peradilan Agama Di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat Dalam Rentang Sejarah*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Jejak Langkah Haji Agus Salim Panita usia 70 tahun*. Jakarta: Tintamas, 1957.
- Kartodirjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1993.
- Kafrawi, Ridwan, ed. *Ensiklopedia Islam: Jilid 4*. Jakarta: Iktisar Van Hoeven, 1993.

- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Budaya, 2013.
- Larson, George. D. *Masa Menjelang Revolusi Keraton dan Kehidupan Politik di Surakarta*. Jakarta: Gajah Mada University, 1990.
- Lev, Daniel. *Peradilan Agama Islam di Indonesia Suatu Studi Tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum*. Jakarta: Intermasa, 1986.
- Lukito, Ratno. *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. Jakarta: INISI, 1998.
- Martono, Sumarsaid. *Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau Studi Tentang Masa Matram II Abad XVI-XIX*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.
- Margana. *Surakarta dan Yogyakarta 1769-1874*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Masjid. M. Dien dan Johan Wahyudi. *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Mulkhan, Abdul Munir. *Islam Murni dalam Masyarakat Petani*. Yogyakarta: Bentang Budaya, 2000.
- Nasution, Harun. *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.
- Noeh. *Sejarah Peradilan Agama*. Direktorat Pengadilan Agama: Jakarta, 1971.
- Notosusanto. *Peradilan Agama Islam di Jawa dan Madura*. Yogyakarta, 1953.
- Soedibyo, Moryati *Sri Susuhunan Paku Buwonono*
- Szompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Terj. Prenda. Jakarta: Kencana, 2007.
- Steenbrink, Karel A. *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad Ke 19*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Pijper, G.F. *Beberapa Studi Tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950*. Terj. Tudijimah dan Yessy. Jakarta: UI Press, 1987.
- Purwadi, dkk. *Sri Susuhunan Paku Buwono X Perjuangan, Jasa dan Pengabdian untuk Bangsa*. Jakarta: Bangun Bangsa, 2009
- Pusponegra, Marwati Djoened. *Sejarah Nasional Indonesia IV*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Pusponegara, Ma' Mun. *Kauman Religi, Tradisi dan Seni*. Surakarta: Paguyuban Kampung Wisata Batik Kauman, 2007.

- Qayim, Ibnu. *Kiai Penghulu Jawa Peranannya di Masa Kolonia*. Jakarta: Gema Insani Perss, 1997.
- Rahmad, Jatnika. *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Ratna, Dwi, ed. *Sejarah Kerajaan Tradisional Surakarta*. Jakarta: Ilham Bagaun Karya: 1999.
- Rajiman. *Sejarah Kartasura sampai Surakarta Hadinigrat*. Surakarta: Toko Buku Krida, 1984.
- Salim, Agus. *Perubahan Sosial: Seketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.
- Soekarto, Soerjono. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Suhardono, Edy. *Teori Peran dan Konsep Derviasi dan Implikasinya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Sumarjan, Selo. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta: Komunitas Bambu 2009.
- Supriadi dan Rajiman, Choirul Fuad Yusuf. *Dinamika Kehidupan Religius Kasunanan Surakarta*. Jakarta: Puslitbang Lektur, 2014.
- Suminto, Akib. *Politik Islam di Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES, 1996.
- Supardi. *Kiai dan Priayi di Masa Transisi*. Surakarta: Yayasan Pustaka Cakara 2001.
- Suratman, Darsiti. *Kehidupan Dunia Kraton Surakarta*. Yogyakarta: Yayasan Tamansiswa Penerbit, 1989.
- E. Gobe dan C. Adriaanse. *Nasihat-Nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawainnya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936*. Jakarta: INIS, 1991.
- Zuhria, Erfaniah. *Sejarah Peradilan Agama Indonesia: Sejarah, Konsep, dan Praktik di Pengadilan Agama*. Jakarta: Satara Press, 2014.
- Wojowasito, S. *Kamus Umum Belanda-Indonesia*. Jakarta: Lestari Perkasa, 2006.

Sumber Arsip :

- Staatsbald* 1937 Nomor 116. Perpustakaan BPAD Yogyakarta.
- Bundel tentang Perkumpulan Penghulu dan Pegawai 1931 Perpustakaan,

Reksa Pustaka Mangkunegara.

Pedoman Perhimpunan Penghulu PPDP Perpustakaan Radiya Pustaka

Sumber internet :

Kemendikbud Republik Indonesia. *KBBI* diakses dari <https://kbbi.web.id/peran> .

Pada 24 Agustus 2017 pukul 10.20 WIB.

Sumber Skripsi :

Nur Lutfika Muhiba Fatatik “*Peranan Penghulu Mangkunegara pada Masa Pemerintahan Mangkunegara VII tahun 1916-1944*” Skripsi Fakultas Sastra dan Seni Rupa mahasiswa, Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2008, tidak diterbitkan.

Siti Lailatul Munawaroh “*Tugas dan Wewenang Penghulu Kasultana Yogyakarta berdasarkan Staatsblad tahun 1882,*” Skripsi disusun oleh, Fakultas Adab dan Ilmu budaya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013, tidak diterbitkan.

Wulandari, “*Sejarah Kampung Kauman Surakarta tahun 1900-1945 Sebuah Studi Perubahan Sosial*” Skripsi Fakultas Sastra dan Seni Rupa, Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 1989, tidak diterbitkan.

Yeni Dwi Ayu Pramita. “*Abdi Dalem Penghulu Pada Masa Pemerintahan Paku Buwono X Kraton Kasunanan Surakarta 1893-1939*” Skripsi, Fakultas Sastra dan Seni Rupa, Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2013, tidak diterbitkan.

DAFTAR-LAMPIRAN

Lampiran ke 1



Bendel Perkumpulan penghulu dan pegawai

Lampiran 2



Foto penghulu dan ulama di Surambi Masjid Agung Surakarta tahun 1935

STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH-INDIË

1937 No. 116

RECHTSWEZEN. PRIESTERRADEN. GODSDIEN-
STIGE RECHTSPRAAK. INLANDSCHE BOE-
DELKAMERS. REGLEMENTEN. Voorloopige
voorzieningen omtrent de in het reglement op de
godsdiensstige rechtspraak opgenomen bevoegdheids-
afbakening tusschen wereldlijken en godsdiensstigen
rechter.

IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR-GENERAAL VAN
NEDERLANDSCH-INDIË,

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut!

doet te weten:

Dat Hij, in afwachting van de inwerkingtreding van
Hoofdstuk I van het Reglement op de godsdiensstige recht-
spraak, de benoeming van voogden en de Inlandsche boedel-
kamers op Java en Madoera, vastgesteld bij de ordonnantie
van 31 Januari 1931 (Staatsblad No. 53), de noodige voor-
zieningen willende treffen om de in dat reglement opgenomen
bevoegdheidsafbakening tusschen wereldlijken en godsdiens-
stigen rechter reeds thans te kunnen invoeren;

Den Raad van Nederlandsch-Indië gehoord en in overeen-
stemming met den Volksraad;

Heeft goedgevonden en verstaan:

Artikel I.

Het Koninklijk besluit van 19 Januari 1882 No. 24 (Indisch
Staatsblad No. 152) wordt aangevuld als volgt:

Na artikel 2 wordt een tweetal nieuwe artikelen ingevoegd, luidende als volgt:

Artikel 2a.

(1) De priester raad is uitsluitend bevoegd tot kennisneming van geschillen tusschen Mohammedaansche echtgenooten en andere rechtszaken het huwelijk, de verstooting, de verzoening en de echtscheiding tusschen Mohammedanen betreffende, waarbij de tusschenkomst van den godsdienstigen rechter vereischt is, en tot het uitspreken van echtscheiding en het constateeren dat de voorwaarde eener voorwaardelijke verstooting is ingetreden, met dien verstande, dat ook bij deze geschillen en rechtszaken alle vorderingen strekkende tot betaling van een geldsom en tot afgifte van bepaalde voorwerpen of goederen tot de kennisneming van den gewonen rechter zullen behooren, met uitzondering van die nopens de huwelijks gift (mahr) en het door den man aan de vrouw verschuldigde levensonderhoud (nafakah), welke in hun geheel ter berechting staan van den priester raad.

(2) De priester raad is niet bevoegd van de in het vorige lid genoemde rechtszaken kennis te nemen, indien daarop het Burgerlijk Wetboek van Nederlandsch-Indië van toepassing is.

(3) Indien de uitvoering van een door den priester raad inzake huwelijks gift of levensonderhoud gewezen vonnis, dan wel de betaling der in het vonnis opgelegde gerechtskosten niet vrijwillig geschiedt, kan door den belanghebbende een afschrift van het vonnis worden aangeboden aan den voorzitter van den landraad binnen wiens rechtsgebied de priester raad gevestigd is.

(4) Deze verklaart het vonnis executoir, door aan het hoofd te stellen de woorden: „In naam des Konings” en aan den voet de door hem gedagteekende en onderteevende verklaring, dat het vonnis is executoir verklaard.

(5) Daarna kan het vonnis ten uitvoer gelegd wor-

den naar de gewone regelen van tenuitvoerlegging van burgerlijke vonnissen der landraden.

Artikel 2b.

(1) Bevindt een rechtbank of gerecht bij kennisneming van een burgerrechtelijk geschil, dat aan de beslissing daarvan die van een geschilpunt moet voorafgaan, behorende tot de bevoegdheid van den priesteraad, dan wordt de verdere behandeling uitgesteld en het geschilpunt, dat tot de bevoegdheid van den priesteraad behoort, door de rechtbank of het gerecht bij den priesteraad aangebracht.

(2) De priesteraad vermeldt in zijne beslissing door welken rechter het geschilpunt is verwezen en deelt deze zoo spoedig mogelijk aan den betrokken rechter mede.

B.

Na artikel 7 wordt een nieuw artikel toegevoegd, luidende als volgt:

Artikel 7a.

Indien zich een geschil om bevoegdheid tusschen den priesteraad en een ander gerecht of een rechtbank voordoet, dient de priesteraad, de rechtbank of het andere gerecht dan wel een der belanghebbenden een schriftelijk verzoek in bij den Gouverneur-Generaal die, na ingewonnen advies van het Hooggerechtshof, in overeenstemming met den Raad van Nederlandsch-Indië, uitspraak doet, onder vernietiging van het onbevoegdlijk gewezen vonnis en van zijne gevolgen.

Artikel II.

De ordonnantie van 31 Januari 1931 (Staatsblad No. 53) wordt gewijzigd als volgt:

A.

Het bepaalde in artikel I, voorzoover strekkende tot wijziging van artikel 3 van het Reglement op de rechterlijke organisatie en het beleid der justitie in Nederlandsch-Indië, vervalt.

Artikel IV wordt gelezen:

„Te bepalen, dat het Inlandsch Reglement wordt gewijzigd als volgt:

1°. artikel 235 vervalt.

2°. in artikel 236, zooals het luidt ingevolge de ordonnantie van 24 Februari 1936 (Staatsblad No. 81), wordt in stede van „234a en 235” gelezen „en 234a”

Artikel III.

In het Inlandsch Reglement wordt na artikel 236 een nieuw artikel 236a ingevoegd, luidende:

„Op verzoek van de gezamenlijke erfgenamen of van gewezen echtgenooten verleent de landraad ook buiten geschil zijn medewerking tot het tot stand brengen van een boedelscheiding tusschen Inlanders van welken godsdienst ook, en het opmaken van de acte daarvan”.

Artikel IV.

Artikel 3 van het Reglement op de rechterlijke organisatie en het beleid der justitie in Nederlandsch-Indië wordt gelezen als volgt:

„(1) Overal, waar de rechtspraak, genoemd bij artikel 134, tweede lid der Indische Staatsregeling, niet door afzonderlijke bepalingen wordt beheerscht, kan de uitvoering van de krachtens dat voorschrift gedane uitspraken, indien zij niet vrijwillig geschiedt, niet anders plaats hebben dan langs den gewonen weg van rechten en na executoirverklaring door het hoogste Inlandsche rechterlijke college.

(2) In geval van verschil over de competentie in de bij het vorige lid bedoelde zaken beslist de Gouverneur-Generaal”.

Artikel V.

Deze ordonnantie treedt in werking met ingang van 1 April 1937, met uitzondering van artikel II, sub B, op de

inwerkingtreding waarvan toepasselijk is artikel V van de ordonnantie van 31 Januari 1931 (Staatsblad No. 53).

Op het in het eerste lid genoemde tijdstip eindigt de bevoegdheid van den priesteraad om beslissingen te nemen in andere zaken dan die in artikel 1, sub A omschreven. Op de executoirverklaring van zijn voor dat tijdstip genomen beslissingen blijven de bestaande bepalingen van toepassing.

En opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende, zal deze in het Staatsblad van Nederlandsch-Indië worden geplaatst.

Gedaan te Buitenzorg, den 19den Februari 1937.

A. W. L. TJARDA VAN STARKENBORGH.

De Algemeene Secretaris,
J. M. KIVERON.

Uitgegeven den zes en twintigsten Februari 1937.

De 1e Gouvernements Secretaris,
J. RAMAER.

(Besluit van den Gouverneur-Generaal
van 19 Februari 1937 No. 9).

Teks-8

Dhawuh pangandika-Dalem ijajah Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan dhumateng Wadana Pangulu ingkang mentas katetepaken énggal kadhawuhaken sasampunipun ngabekti kados ing ngandhap punika.

1. Tapsir anom Ingsun agawé Pangulu marang sira Ingsun lilani anindakaké kukum sangak sapanunggalané sing kagolong bangsané bab ngibadah lan sing pantes sira pitayakaké marang bocah Ingsun pamutiyen ngibadah kang sira pitayakaké ayat imamam jamangah lan barjamangah sapanunggalané.
2. Lan kukumingSun kangingSun paringaké ing SurambiningSun rupané kayata : talak, waris, wasiyat, salaki rabi utawa barang gana-gini sapanunggalané sabanjuré tumindak, Ingsun pitaya marang sira apa kang wus dadi beneré sarta mupakat ijdiyaté para bocah Ingsun Ketib, Ngulama sapanunggalané.
3. Lan Ingsun mitayakaké marang sira mungguh agamané bocah Ingsun ing Surakarta kabèh sawatira kolehira amuruk mangkono manéh bocah Ingsun pradikan lan kaum sapanunggalané kang padha kagolong abdiningsun pamutiyen bab lakuné harjaning agama Rasul olehira anindakaké apa kang dadi beneré kukum Ingsun ing wus pitaya marang sira.

Dhawuh ing timbalan-Dalem ingkang minongka pamungkas punika manawi kaki mboten kapundhut

Teks

Déné bab kagunganingSun Wali, Kakim lan palakiné bocah Ingsun Pinggir kang wus tatela titi priksané ing dina iki Ingsun paringaké marang sira bab idin lalakiné mau sabanjuré kalakon apa kang wus dadi adaté kabèh iku olehira anindakaké apa kang wus kasebut ing dhawuh Ingsun ngajap mau kabèh kang nastiti angatiyati kang kendel apa sabeneré pangadilaningSun.

Manawi kagungan-Dalem kakim kapundhut kondur.

Déné bab kagunganingSun wali kakim lan palakiné bocah Ingsun pinggir ing dina iki Ingsun pundhut kondur ana ngarsaningSun sira angladèkna ing Sri Manganti Ingsun ingkang aparing idin palakiné mau.

Manawi kakim kapundhut mamasa pangantèn sampun kaladosaken dhawuh timbalan-Dalem dhumateng abdi-Dalem Ketib ingkang angladosaken ing ngandhap punika.

Dhawuhna marang bocah Ingsun ketib kang angladèkaké pangantèn kakim kadhawuhna marang Si-Pangulu Tapsir Anom Ingsun wus angidini lalakiné bocah Ingsun kang padha kasebut ana ing layang paturané Si-Pangulu Tapsir Anom kang wus terang titi priksané.

Dhawuhing pangandika-Dalem ijajah nginggil punika kadhawuhaken dhateng Radèn Pangulu Tapsir Anom sapunika nalika dinten malem Jumungah tanggal kaping 18 wulan Sapar ing tahun Dal angkanipun ing warsa 1885.

surat pengangkatan pengulu Tapsir Anom di Kraton Surkata

Teks 61 n

Kawula nuwun sembah pamuji kawula abdi-Dalem pun Pangulu Tapsir Anom konjuk sahandhap ing Sampéyan-Dalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan.

Jrih kawula nuwun kaabdèkaken, abdi-Dalem kawula angunjukaken pangandika-katamtokaken dados abdi-Dalem Wadana Pangulu, sowanipun ing ngarsa-Dalem saos bekti sahandhap ing Sampéyan-Dalem, lajeng anampèni dhawuh ing timbalan-Dalem kados ing ngandhap punika.

1. Ingsun agawé pangulu marang sira, Ingsun lilani anindakaké kukum sarak sapanunggalané sing kagolong bangsané bab ngibadah, lan sing pantes sira pitayakaké marang bocah Ingsun Pamutiyen, ngibadah kang sira pitayakaké, kayata: imaman jumungah lan bar jamangah, sapanunggalané.
2. Lan kukum Ingsun kang Ingsun paringaké ana ing surambi Ingsun rupané kayata: talak, waris, wasiyat, salaki rabi, utawa barang gana gini, sapanunggalané, sabanjuré tumindak Ingsun pitaya marang sira, apa kang wis dadi beneré, sarta mupakat ijdiyaté para bocah Ingsun ketib, ngulama, sapanunggalané.
3. Lan Ingsun mitayakaké marang sira mungguh agemané bocah Ingsun ing Surakarta kabèh, sakuwat ira oleh ira amuruk, mangkono manèh bocah Ingsun pradikan lan kaum sapanunggalané, kang padha kagolong abdiningsun mutiyen, bab lakuné arjaning agama rasul, oleh ira anindakaké apa kang dadi beneré kukum, Ingsun iya wus pitaya marang sira.

Dhawuh ing timbalan-Dalem ingkang minangka pamungkas punika manawi kakim boten kapundhut.

Déné bab kagungan Ingsun wali kakim lan palakiné bocah Ingsun pinggir, kang wus tatéla titi priksané, ing dina iki Ingsun paringaké marang sira, bab idin palakiné mau sabanjuré kalakon, apa kang wus dadi adaté kabèh iku oleh ira anindakaké apa kang

Teks

wus kasebut ing dhawuh Ingsun ngarep mau kabèh, kang nastiti ngati-ati kang kèndel apa sabeneré pangadilan Ingsun.

Manawi kagungan-Dalem kakim kapundhut kondur.

Déné bab kagunganingSun wali akakim lan palakiné bocah Ingsun pinggir, ing dina iki Ingsun pundhut kondur ana ngarsa ningsun, sira angladèkna ing Srimanganti, Ingsun ingkang kaparing idin palakiné mau, manawi sampun kaladosaken dhawuh ing timbalan-Dalem dhumateng abdi-Dalem Ketib ingkang angladosaken dhawuh ing timbalan-Dalem dhumateng abdi-Dalem Ketib ingkang angladosaken ing ngandhap punika.

Dhawuhna marang bocah Ingsun Ketib angladèkaké pangantèn kakim, kadhawuhna marang si Pangulu Tapsir Anom, Ingsun wis angidini palakiné bocah Ingsun kang padha kasebut ana ing layang paturané si Pangulu Tapsir Anom, kang wus terang titi priksané.

Menggah punika saserepan kawula sangking cariyosipun abdi-Dalem pun Pangulu Tapsir Anom, ingkang sampun ajal sapunika, nalika taksih gesangipun, kawula anyumanggakaken sahandhap ing Sampéyan-Dalem Inkgang Sinuhun Kangjeng Susuhunan.

Konjuk ing dinten malem Jumungah tanggal kaping 18 wulan Sapar ing taun Dal angkanipun ing warsa 1815.

Surat perintah dari Suhuhuan Pakubuwono tentang tugas-tugas penghulu Kasuanan Surakarta.

Teks 86 b

Penget layang manira parentah undhang-undhang Kangjeng Raden Adipati Sasradiningrat terang kaliyan Kangjeng Tuwan Sasradiningrat Mister Baronhehir Residhen ing Surakarta Hadiningrat, atas dhawuh-Dalem ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan, dhawuha marang sarupaning wong kang lumaku ing gawe utawa pangindhung kang padha omah-omah ana ing bumi Pakauman kang kalebu bawah ing Pakauman.

Bab I

Manira aparing weruh marang ing pakenira kabeh, yen manira anampani atur panuwune Mas Pangulu, Tapsir Anom sakancane, ngulama sa-Ketib Modin kabeh, yen ing saiki mungguh patrape wong kang padha omah-omah ana bumi Pakauman, asuwun kabangun kaya alame panyjenengan-Dalem ingkang Sinuhun Pakubuwana kaping 4, ingkang supaya aja ana wong padha anglakoni panggaweyan maksiyat, wis manira saosake kunjuk ing saandhape Sampeyan-Dalem ingkang Sinuhun, mungguh dhawuh-Dalem iya marengake.

Bab 2

Iku sarupaning wong kang padha omah-omah ana sajroning Pakauman kabeh, ing saiki aja wani-wani anglakoni panggawe kang jeneng maksiyat kayata: nanggap taledhek utawa wayang walulang lan nabuh gamelan kang ora ana gawene, apadene angombe arak sarta ngabotohan sapapadhane, kang jeneng panggawe maksiyat kaadat kang wus kalakon kang mau-mau.

Bab 3

Dene kang manira lilani anabuh gamelan, manawa duwe gawe mantu, duwe anak, tingkep, lan anetakaken, liya saka iku ora manira lilani kabeh, sapapadhane manawa ana wong kang wani anerak parentah kaya kang wus manira dhawuhaken ora kalilan, amasthi manira res ana ing surambi-Dalem lawase 40 dina, sarta manira patrapake ing gawene angresiki palataran masjid gedhe.

Bab 4

Dene manawa nganti wani-wani nerak kaping pindho, iku sapa wonge banyjur katundhunga saka bale omahe bumi ing Pakauman kono, yen meksa mogok ora gelem ngalih ing bumi liyane, amasthi banyjur manira res ana ing sipir, ora manira luwari yen omahe durung kabadhol, banyjur kaelih, sabab iku wus manira tetepake wong maha wani-wani angrusak agamaning rasul.

Bab 5

Kang iku parentah manira marang sarupaning wong kang omah-omah ana bumi Pakauman, padha nglakokna wawaler agamaning rasul kabeh, aja kongsi ana kang nglakoni panggaweyan maksiyat mau, angestokna saunine layang undhang-undhang iki kabeh, sapa wonge kang ora angestokaken amasthi nemu kaluputan saka ing Kangjeng parentah gedhe.

Bab 6

Dene layang manira parentah undhang-undhang iki banyjur dadiya sasimpenane Mas Pangulu Tapsir Anom, sarta sakancane, ngulama, Ketib, Modin kabeh, katunggalna karo gadhuhan pakenira layang palekat kang supaya masa ana kang padha nglakoni panggawe maksiyat, pakenira Mas Pangulu inggal angaturana uninga ing parentah, banjur kunjuk ing saandhap sampeyan-Dalem ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan.

Dhawuh parentah undhang-undhang ing dina senen tanggal kaping 22 sasi Sura tahun Wawu angka 1777.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 9 Oktober 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/8497/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
Tengah

di Semarang

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-1636/Un.2/DA.1/TU.00.9/10/2017
Tanggal : 6 Oktober 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"PERUBAHAN PERAN PENGHULU PASCA KELUARNYA STAATSBLAAD 1937 NO. 116 DI KASUNANAN SURAKARTA 1937-1943 M"** kepada:

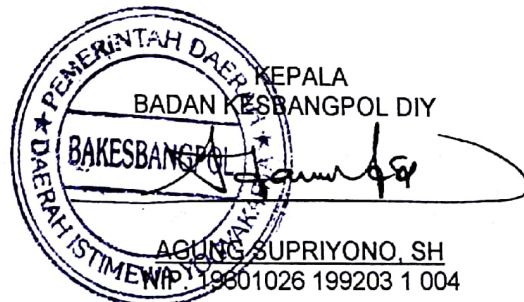
Nama : AGUS TRIYANTA
NIM : 13120043
No.HP/Identitas : 089637202092/3310010108930001
Prodi/Jurusan : Sejarah Kebudayaan Islam
Fakultas : Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Kraton Surakarta, Perpustakaan Rekso Pustoko, Perpustakaan Widya Pustaka
Waktu Penelitian : 9 Oktober 2017 s.d 9 April 2018
Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA

Jl. Marsda Adi sucipto Yogyakarta 55281 Telp./Fak. (0274) 513949
Web : <http://adab.uin-suka.ac.id> E-mail : adab@uin-suka.ac.id

06 Oktober 2017

Nomor : B-1636/Un.2/DA.1/TU.00.9/10/2017
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada:
Yth, GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
C.q. KESBANGPOL DIY
Jl. Jend. Sudirman No.05
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menerangkan bahwa :

Nama : Agus Triyanta
NIM : 13120043
Program Studi : Sejarah dan Kebudayaan Islam

bertujuan untuk melakukan penelitian di Kasunanan Surakarta dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

PERUBAHAN PERAN PENGHULU PASCA KELUARNYA *STAATSBLAAD* 1937 NO. 116
DI KASUNANAN SURAKARTA 1937-1943 M

di bawah Bimbingan : Prof. Dr. Dudung Abdurrahman, M.Hum

Sehubungan dengan itu, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut dalam rangka melakukan penelitian.

Atas kesediaan dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



an, Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik.

A. Maharsi

Tembusan :
Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya;

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Agus Triyanta
Tempat & Tgl. Lahir : Klaten , 1 Agustus 1993
Nama Ayah : Alm Sarjono
Nama Ibu : Sumarni
Asal Instansi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Beji sari, Taji, Pramaban, Klaten
E-mail : agustri297@gmail.com
No. HP : 089637202092

B. Riwayat Pendidikan

- a. TK Pertiwi Taji : tahun lulus 2001
- b. SD N 1 Taji : tahun lulus 2007
- c. MTS N 3 PRAMABANAN : tahun lulus 2010
- d. MAN 2 KLATEN : tahun lulus 2013
- e. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : tahun lulus 2018

C. Pengalaman Kegiatan

- 1. Anggota HMI komeserat Adab dan Ilmu Budaya : 2013-2015
- 2. Wakil ketua Keluarga Mahasiswa Klaten UIN Suka : 2014-2015
- 3. Ketua Karang Taruna Dusun Beji Sari : 2013-2014
- 4. Ketua Risma Masjid Al Iklas Dusun Beji Sari : 2015-2016